

NALAR PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Indra Jaya
PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
indraj829@gmail.com

Abstrak

Nalar Pancasila adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Sehingga komunikasi politik tidak lagi dijadikan hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan politik, tetapi harus berkhidmat kepada kepentingan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nalar politik sila pertama Pancasila dalam konteks komunikasi politik adalah memberikan landasan teologis bahwa komunikasi politik yang dibangun harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan manifestasi nilai-nilai ketuhanan yang sifatnya universal. Nalar kedua Pancasila dalam komunikasi politik, yaitu bahwa komunikasi politik harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adil dapat dikatakan tidak berat sebelah, berkomunikasi penuh kejujuran, tidak saling merendahkan nilai-nilai satu sama lain yang justru akan memicu konflik. Nalar ketiga Pancasila dalam komunikasi politik adalah komunikasi politik yang dibangun dan dilakukan harus diorientasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Komunikasi politik tidak boleh memicu masyarakat untuk melakukan disintegrasi dan memecah belah sehingga menimbulkan kerapuhan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nalar keempat Pancasila dalam komunikasi politik mengandung filosofi bahwa setiap perbedaan dalam komunikasi politik adalah hal yang wajar, namun harus diingat bahwa perbedaan itu harus dilandasi oleh kebijaksanaan (*wisdom*) dalam lingkup musyawarah. Seorang komunikator politik harus senantiasa bersikap arif, tidak memaksakan kehendak (*ego*) yang akan menimbulkan perpecahan. Nalar kelima dari Pancasila dalam komunikasi politik mengandung pengertian bahwa komunikasi politik yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa membedakan asal-usul mereka. Komunikasi politik diletakkan pada prinsip egaliter, kesamaan, dan kebersamaan.

Kata Kunci: nalar Pancasila, komunikasi politik, hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi politik

Abstract

Pancasila reason is the embodiment of Pancasila values as the foundation of ethics in conducting political communication. So political communication is no longer used only as a tool to gain political interests, but must be respectful to the interests and ideals of the nation and state as stated in the Preamble of the 1945 Constitution. Pancasila's first political conscience in the context of political communication is to provide a theological basis that The established political communications must be in harmony with the divine values. Values such as honesty, fairness, equality, mutual respect and respect are the manifestations of universal divine values. The second reason of Pancasila in political communication, namely that political communication must be done in a nonsense and uphold the values of humanity. Fair can be said to be one-sided, to communicate honestly, not mutually degrading the values of each other that will precipitate conflict. The third reason Pancasila in political communications

is the political communication that is built and done must be oriented in maintaining unity and unity. Political communication should not trigger the community to disintegrate and divide, resulting in fragility in the context of the principle of nation, nation and state. The fourth reason Pancasila in political communication contains the philosophy that any distinction in political communications is a natural thing, but it must be remembered that the difference must be based on wisdom within the scope of deliberation. A current political communicator is always wise, does not impose the will (ego) that will cause division. The fifth reason of Pancasila in political communication implies that political communication must uphold the values of justice without distinguishing their origins. Political communication is placed on egalitarian principles, commonality, and togetherness.

Keywords: *Pancasila reason, political communication, the nature and principles of political communication*

Pendahuluan

Bagi para politisi, komunikasi politik telah menjadi bagian penting dalam kiprahnya. Komunikasi politik tidak saja digunakan untuk menyampaikan pesan politik, tetapi dapat digunakan untuk menangkis serangan politik, mengaburkan realitas politik, mengalihkan dari satu isu ke isu yang lain, membangun pencitraan, memasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan politik, bahkan dijadikan sebagai alat untuk menghantam lawan politik atau sering disebut sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*). Komunikasi dalam politik bagaikan “darah” yang membawa beragam pesan dari mulai yang sifatnya konstruktif hingga yang destruktif. Komunikasi politik atau komunikasi secara umum ditempatkan sebagai instrument, sebagai alat yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan komunikatornya.

Secara teoretik, realitas politik merupakan realitas bentukan, realitas yang secara sadar dikonstruksi melalui komunikasi. Dalam kajian konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya.

Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengonstruksi dunia sosialnya (Bungin, ed., 2006:4). Oleh karena itu, politisi adalah makhluk yang “merdeka” untuk membuat konstruksi mengenai realitas politik yang dianggap menguntungkan diri dan kelompoknya. Ketika politik diposisikan sebagai yang dikonstruksi, maka politisi akan mengonstruksi realitas politik sebagaimana kepentingannya melalui komunikasi yang dibangunnya.

Lanskap komunikasi politik Indonesia menemukan ruang kebebasannya pada saat runtuhnya rezim Orde Baru dan masuk Orde Reformasi. Komunikasi politik yang mulanya dibangun diatas kepalsuan (artifisial) dan basa-basi berubah seratus delapan puluh derajat menjadi komunikasi yang bebas, radikal, bahkan kerap kali dikatakan kebablasan. Kekuasaan eksekutif yang dulu tak tersentuh (*untouched*) mengalami degradasi dan kehilangan sakralitasnya, sehingga siapa pun dapat mempersoalkannya hingga pada penggunaan kalimat-kalimat yang sifatnya sarkasme (Badudu, 1994). Pada ruang kebebasan komunikasi politik saat ini, seorang politisi dapat menjatuhkan politisi lain menggunakan *content* (isi) komunikasi politik “hitam”. Dari situ pula lahirlah

istilah kampanye hitam (*black campaign*). Bahkan bukan sebatas itu, seorang politisi bisa jatuh harkat dan martabatnya dengan memuat masa lalu yang bersangkutan yang negtaif melalui media massa dan sosial. Misalnya, kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya.

Sejatinya, komunikasi (politik) harus diorientasikan untuk menciptakan harmoni, menciptakan kesetaraan (*equality*), saling tukar informasi, membangun kebersamaan, dan menciptakan realitas politik yang kondusif. Menurut Ardial (2009), komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Melalui komunikasi politik yang “sehat” akan terbentuk kondisi yang stabil dan memungkinkan pemerintah dapat membangun guna mencapai kesejahteraan bersama. Namun saat ini, komunikasi politik kerap kali dijadikan “martil” untuk menekan, menghajar, menghancurkan, bahkan mematikan kelompok lain dengan menggunakan beragam konspirasi yang cenderung menghalalkan segala cara.

Dalam kajian filsafat ilmu, terutama yang dibangun oleh para filosof Timur, Ilmu haruslah berdimensi etik yang harus memanusiaikan manusia dan bukan menghancurkannya. Gerakan sekularisasi yang mencoba memisahkan antara ilmu dan agama sebagai sumber nilai telah menjadikan sejarah dan peradaban manusia jatuh ke titik nadir. Ilmu yang dikembangkan termasuk kajian dan parktek komunikasi politik harus mendapat legitimasi moral sehingga eksistensinya bermanfaat bagi kehidupan manusia secara universal (Syarbaini, 2011). Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai segala dari segala sumber nilai tidak memberikan tempat

kepada pemisahan ilmu dengan nilai Pancasila. Pada tataran ontologis, epitemologis, dan aksiologis (Adib,2010), ilmu tidak bebas nilai, tetpi terkait dengan nilai, yakni nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Sindiran yang menampar wajah kaum ilmuwan sebagaimana dikatakan Edwar W. Said (dalam Syahputra, 2007), demikian:

....kaum cerdik pandai telah tertipu. Dikatakann ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim *value free* ternyata penuh dengan kepentingan ekonomi (sejarah ekspansi negara-negara kuat era globalisasi), kepentingan militer/perang (seperti ilmu nuklir), dan dominasi kepentingan kebudayaan Barat (orientalisme).

Merujuk kepada penjelasan tersebut, komunikasi politik sejatinya tidak bisa melepaskan diri dari Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar filsafat) dimana ilmu, kajian, dan perspektif dikembangkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Bila saat ini ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya komunikasi politik hanya digunakan untuk kepentingan pragmatis tanpa dilandasi oleh dasar etis Pancasila, maka negara ini akan terus berada pada situasi yang gaduh. Kasus terbelahnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) adalah bukti sahih bahwa para politisi menggunakan retorika, komunikasi politik dan kekuasaan hanya untuk kepentingan sesaat, dan pada saat yang sama rakyat dikorbankan.

Pada realitas seperti itu, setiap politisi (aktor komunikasi politik) harus memiliki nalar Pancasila, yaitu cara-cara berkomunikasi politik dan berpolitik itu sendiri yang didasarkan atas pemikiran, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila secara utuh. Anomali politik yang tengah terjadi saat ini

sehingga menimbulkan kegaduhan yang luar biasa disebabkan oleh perilaku komunikasi politik yang lepas kontrol dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila lebih banyak menjadi mainan politisi yang diucapkan sebagai hiasan bibir (*lip service*) yang justeru untuk memperdaya masyarakat. Pancasila lepas dari pemahaman yang kritis, tidak menjadi sumber inspirasi dan penghayatan, dan tercampakan dalam perbuatan. Untuk menajamkan pembahasan sekaligus memberikan batasan pada makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat komunikasi politik ?
2. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip komunikasi politik ?
3. Bagaimana kaitan antara komunikasi politik dengan nalar Pancasila ?

Sekurang-kurangnya ada dua tujuan dalam penulisan makalah ini. *Pertama*, makalah ini ingin memberikan penekanan secara filosofis-ilmiah tentang hakikat komunikasi politik, prinsip-prinsip komunikasi politik, serta keterkaitan antara nalar Pancasila dengan keilmuan-teoretik komunikasi politik.

Kedua, makalah ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktek komunikasi politik oleh berbagai kalangan, terutama oleh para komunikator politik. Sejauh ini kerap kali terdapat kesenjangan antara praktek ilmu dengan nilai-nilai, atau bahkan dengan filsafat negara. Melalui kajian yang sederhana ini, penulis ingin memberikan “setitik” kontribusi pada wilayah teoretik dan praksis komunikasi politik.

Pada bagian kerangka pemikiran ini akan dijelaskan secara singkat beberapa konsep utama yang menjadi fokus kajian dalam lingkup komunikasi politik dan nalar Pancasila. Hal ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: *Pertama*, kerangka pemikiran ini akan memberikan sekelumit

wawasan tentang hakikat dan prinsip komunikasi politik. Kecenderungan stereotif pemahaman masyarakat (awam) terhadap komunikasi politik yang negatif, politik itu merusak, membuat orang menderita, pembunuhan karakter, dan sangat pragmatis.

Kedua, kerangka pemikiran ini ingin mengelaborasi secara mendalam mengenai nalar Pancasila yang harus menjadi landasan dalam keilmuan-teoretik komunikasi politik berbasis nalar Pancasila hingga implementasinya pada wilayah praksis. Sejauh ini, terjadi keterputusan ketika menjelaskan akar nilai komunikasi politik dengan Pancasila, dan lebih parah keterputusan itu terjadi pada wilayah praksis. Maka jargon bahwa politik itu “kotor” nyaris telah diimani oleh sebagian besar masyarakat.

Akhir-akhir ini kajian tentang komunikasi politik telah menjadi kajian yang “seksi”, dan karenanya telah melahirkan banyak ilmuwan komunikasi politik, pengamat, komentator, buku, jurnal, dan bahasan-bahasan lainnya yang tersebar di media sosial. Dalam sejarahnya, kajian tentang komunikasi politik telah dimulai sejak tahun 1922 yang digagas oleh Ferdinand Tonnies yang menerbitkan *Kritik der Offentliche Meinung* yang meneliti sifat opini publik pada masyarakat massa. Namun demikian, kajian komunikasi politik mulai mendapat tempat secara luas sejak tahun 1957. Pada tahun itu, Hennis menerbitkan *Meinungsforschung und representative Demokratie*, dan disusul oleh Habermas yang menulis *Strukturwandel der offentlichkeit* pada tahun 1962 (Rahmat dalam Nimmo, 1999).

Komunikasi politik didefinisikan amat beragam oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Hal demikian dapat dipahami karena komunikasi politik berkembang dari induknya yaitu komunikasi yang bersifat eklektif. Sifat eklektif ilmu

komunikasi sebagaimana dikatakan Schramm (1980) sebagai "jalan simpang paling ramai dengan segala disiplin yang melintasinya". Schramm mengumpamakan ilmu komunikasi sebagai suatu oasis yang merupakan persimpangan jalan, tempat bertemunya berbagai ilmu (*musafir*) yang tengah dalam perjalanan menuju tujuan ilmunya masing-masing. (Sobur, 2003). Untuk kepentingan makalah ini, Anugrah (2013) menyunting beberapa pengertian komunikasi politik, yaitu:

1. Komunikasi politik adalah suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik;
2. Komunikasi politik dapat dilihat dari arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bernuansa info-politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan;
3. Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik..... Artinya, komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik; dan
4. Menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam satu sistem politik. Bahkan menurut kedua pakar tersebut, justru komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan

bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain.

Merujuk kepada beberapa pengertian di atas, maka hakikat komunikasi politik sekurang-kurangnya beroperasi opada dua wilayah, yaitu: (1) proses penyampaian pesan yang bernuansa politik dan berimplikasi politik, dan (2) fungsi-fungsi komunikasi politik yang meliputi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen.

Landasan filosofis komunikasi politik berangkat pada pemahaman pendayagunaan sumber daya komunikasi, apakah itu sumber daya manusia, infrastruktur, maupun piranti lunak untuk mendorong terwujudnya sistem politik yang mengusung demokrasi....., demokrasi menjadi cita-cita yang luhur sesuai dengan hati nurani sehingga dapat diabdikan untuk kepentingan semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang dalam membangun suatu kebersamaan menuju tujuan yang sama (Cangara, 2009). Sejatinya, landasan filosofis komunikasi politik tidak bisa melepaskan dirinya dari substansi politik. Cangara melanjutkan, bahwa esensi politik adalah pengambilan keputusan bukan untuk kepentingan perorangan, melainkan untuk kepentingan orang banyak, cita-cita politikus harus diarahkan untuk menciptakan individu yang memiliki komitmen untuk menjadi "negarawan", karena negarawan hanya dapat dicapai melalui keikhlasan dan kejujuran.

Sudah sangat jelas, bahwa komunikasi politik secara filosofis memiliki nilai luhur untuk kepentingan bersama menuju cita-cita bersama pula, bukan cita-cita perseorangan politisi, atau cita-cita satu partai politik, atau golongan lainnya. Cita-cita bangsa Indonesia secara tersurat sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sungguh, bila didalami menggunakan kesadaran nasionalisme serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, maka tidak sepatutnya jika komunikasi politik itu justru menjadi pemantik konflik, baik antar-politisi, antar-lembaga politik, bahkan di antara para pengamat komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi politik harus mampu memicu rasa kebersamaan, kesetaraan, dan kebaikan bersama (*common good*) yang kemudian diletakkan pada proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agregasi kepentingan yang disuarakan melalui komunikasi politik bukanlah untuk sekelompok orang melainkan untuk kepentingan bersama tanpa membedakan etnik, ras, atau status sosial lainnya. Komunikasi politik harus dibangun oleh nilai-nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) di masyarakat.

Selama ini betapa banyak politisi yang kehilangan identitas dirinya di masyarakat karena disebabkan dari cara mereka berkomunikasi yang memancing perdebatan (polemik), merendahkan satu sama lain, bahkan saling “membunuh” demi tercapainya ambisi politik. Ambisi politik merupakan sesuatu yang wajar, namun yang menjadi persoalan adalah cara-cara untuk mencapainya yang kerap kali menghalalkan segala cara. Pencapaian karier politik bagi para politisi idealnya tidak menabrak nilai, norma, dan etika, yang justru pada tahap tertentu akan merugikan atau kontraproduktif bagi dirinya sendiri. Lahirnya istilah politisi hitam merupakan bukti yang tak

terbantahkan dari reaksi masyarakat terhadap para politisi yang mengenyampingkan moral, etika, dan norma pada ranah politik praksis. Identitas diri seorang politisi harus dibangun oleh dua hal: *Pertama*, terbebas dari dosa sosial, seperti melakukan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme), dan perbuatan amoral yang melanggar kesusilaan. *Kedua*, kemampuan mengkomunikasikan diri yang terbebas dari dosa sosial kepada masyarakat secara simpatik, jujur dan terbuka.

Lantas, dimanakah letak nalar Pancasila dalam komunikasi politik? Secara umum, nalar Pancasila dalam komunikasi politik terletak pada seseorang (politisi) pada saat melakukan komunikasi politik dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai legitimasi etis ketika seseorang melakukan komunikasi politik pada situasi dan kondisi apapun. Tidak ada kesangsian sedikit pun bahwa Pancasila memperlihatkan nafas humanisme universal, demikian kata Syarbaini (2011). Ini mengandung arti bahwa perilaku apapun termasuk perilaku komunikasi politik harus senafas, sejalan, dan sejalin dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kejujuran tanpa manipulasi, mengedepankan kebersamaan diatas egoisitas pribadi dan kelompok.

Menurut Kaelan (2010), sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan ke dalam kehidupan yang praktis atau kehidupan nyata. Selama ini, Pancasila masih menjadi nilai yang belum sepenuhnya membumi dengan indikator betapa banyaknya perilaku yang masih menyimpang.

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, memberikan landasan teologis bahwa komunikasi

politik yang dibangun harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan manifestasi nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu komunikasi politik yang dibangun secara utuh dan merujuk kepada nilai-nilai tersebut. Dan oleh karena itu pula, maka cara-cara komunikasi politik yang merusak nama baik orang lain, menghancurkan, membunuh karakter, manipulatif, dan lain-lain tidak selaras dengan nalar Pancasila.

Menurut Subiakto dan Rachmah Ida (2014), pesan merupakan inti dari komunikasi politik. Pesan ibarat peluru yang ditembakkan ke dada komunikan dengan tujuan tertentu. Aktor komunikasi politik cenderung lebih aktif daripada kebanyakan masyarakat. Jika demikian, maka perumusan pesan politik dan cara-cara menembakkan pesan politik tidak boleh melanggar nilai-nilai ketuhanan. Solatun (2004) menyebutnya sebagai etika komunikasi.

Dalam agama (Islam) sebagai pengejawantahan dari nalar pertama Pancasila terdapat lima hal yang terkait dengan etika komunikasi (politik), yaitu: (1) *Qaulan Sadida*, (2) *Qaulan Baligha*, (3) *Qaulan Ma'rufa*, (4) *Qaulan Karima*, dan (5) *Qaulan Layinan*, (Rahmat, 1996)

1. *Qaulan Sadida* adalah perkataan lurus (tidak berbeli-belit), kata yang benar, keluar dari hati yang suci bersih, dan diucapkan dengan cara demikian rupa, sehingga tepat mengenai sasaran yang dituju. Dari segi substansi, komunikasi (politik) harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Dari segi redaksi, komunikasi harus menggunakan kata-kata yang baik dan

benar, baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku.

2. *Qaulan Baligha* artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (*straight to the point*), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.
3. *Qaulan Ma'rufa* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). Setiap pesan harus terjaga dari pesan yang sia-sia, apapun diucapkan harus selalu mengandung nasehat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya. Jangan sampai mencari-cari kejelekan orang lain, yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain, memfitnah dan menghasut.
4. *Qaulan Karima* bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari "bad taste", seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis.
5. *Qaulan Layina* berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati.

Nalar kedua dari Pancasila dalam komunikasi politik, yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Sila kedua Pancasila ini memberikan pemahaman bahwa komunikasi politik harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adil dapat dikatakan tidak berat sebelah, berkomunikasi penuh kejujuran, tidak saling merendahkan nilai-nilai satu sama lain yang justeru akan

memicu konflik. Konflik politik yang kerap kali terjadi pada wilayah politik praktis, disebabkan kurangnya kemampuan para politisi dalam meredam emosi sehingga menimbulkan saling ejek dan pertengkaran. Di sisi lain, aktor komunikasi politik harus memiliki kedewasaan yang mampu berdiri secara tegak di atas perbedaan.

Nalar ketiga dari Pancasila dalam komunikasi politik adalah “Persatuan Indonesia”. Artinya, komunikasi politik yang dibangun dan dilakukan harus diorientasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Komunikasi politik tidak boleh memicu masyarakat untuk melakukan disintegrasi dan memecah belah sehingga menimbulkan kerapuhan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, dan komunikasi politik harus mampu mengikat keragaman tersebut untuk menjadi suatu kekuatan (potensi) dalam menggapai Indonesia sejahtera secara kolektif.

Nalar keempat dari Pancasila dalam komunikasi politik adalah “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mengandung filosofi bahwa setiap perbedaan dalam komunikasi politik adalah hal yang wajar, namun harus diingat bahwa perbedaan itu harus dilandasi oleh kebijaksanaan (*wisdom*) dalam lingkup musyawarah. Seorang komunikator politik harus senantiasa bersikap arif, tidak memaksakan kehendak (*ego*) yang akan menimbulkan perpecahan.

Nalar kelima dari Pancasila dalam komunikasi politik adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artinya, komunikasi politik yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa membedakan asal-usul mereka. Komunikasi politik diletakkan pada prinsip egaliter, kesamaan, dan kebersamaan.

Ketika komunikasi politik dilakukan dengan saling melecehkan dan merendahkan, maka yang terjadi ketidakadilan, dan ketidakadilan adalah akar dari kehancuran.

Pembahasan

Pada negara demokrasi seperti Indonesia, komunikasi politik memegang peranan penting sebagai jembatan (*bridge*) yang menghubungkan pemerintah rakyatnya. Namun seiring dengan terbukanya kebebasan sebagai konsekuensi dari reformasi, komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi (*aktor politik*) lepas dari Pancasila sebagai nilai sehingga menyebabkan kegaduhan politik dan berujung pada perpecahan. Media massa telah banyak mempertontonkan seorang politisi menghujat politisi lain, atau partai politik yang satu menghantam partai politik yang lain. Cara-cara “barbarian” dalam komunikasi politik tersebut membuka ruang perpecahan dan konflik yang tajam sehingga secara politik merugikan bangsa Indonesia. Karena tidak jarang, ketika elit berkonflik akan merugikan rakyat kecil yang sesungguhnya mereka tidak memahaminya. Rakyatlah yang menjadi korban.

Jika diamati, “kuda liar” komunikasi politik yang cenderung destruktif ini disebabkan oleh hilangnya dimensi nalar Pancasila dalam praktek komunikasi politik. Cara-cara politisi dalam berpolitik saat ini cenderung pragmatis yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya, sehingga komunikasi yang terbangun memposisikan menang-kalah. Bahkan untuk meraih kemenangan seorang politisi melancarkan komunikasi politik yang meruntuhkan harkat, martabat dan harga diri politisi lain.

Filosofi komunikasi politik berangkat pada pemahaman yang meletakkan penggunaan seluruh sumber daya komunikasi untuk mencapai cita-cita

bersama dalam lingkup bangsa dan negara. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara jujur, arif, egaliter, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Politisi harus mampu beranjak untuk mejelma menjadi seorang negarawan yang memiliki komitmen menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

“*Back to nalar Pancasila*” merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komunikasi politik didasari dan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan sehingga komunikasi politik yang terbangun tidak melenceng dari nilai-nilai religiusitas yang bersifat universal. Komunikasi politik harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung persatuan, dilakukan secara arif dan bijaksana, hingga mampu menciptakan rasa keadilan.

Bangsa ini memerlukan kesadaran kolektif akan nalar Pancasila. Untuk menjadikan hal tersebut, maka Pancasila pertama kali harus dimengerti dan dipahami, dirasakan dan dihayati melalui kejernihan batin sehingga menjadi sikap, dan tentu saja Pancasila itu harus mewujudkan dalam seluruh sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memicu dan memantik sehingga menjadi sadar akan Pancasila bukan persoalan mudah, tetapi harus tetap diikhtiarkan tanpa lelah. Pendidikan Pancasila dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus tetap dipacu melalui metode pembelajaran yang lebih variatif, contoh-contoh yang aktual dan gagasan-gagasan yang segar. Bila saat ini, dunia perguruan tinggi disibukan oleh kurikulum berbasis kompetensi, maka suatu saat mungkin digagas tentang kurikulum berbasis Pancasila, atau keduanya diintegrasikan secara harmonis.

Kesimpulan

Secara sederhana, komunikasi politik dapat dipahami sebagai setiap bentuk penyampaian pesan, yang berdimensi politik dari suatu sumber (aktor politik) kepada sejumlah penerima pesan. Sedangkan hakikat komunikasi politik adalah pendayagunaan seluruh sumber daya politik untuk meraih cita-cita bersama yang dalam konteks Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat.

Secara filosofis, ilmu pengetahuan termasuk komunikasi politik harus mengabdikan terhadap kemanusiaan. Artinya, komunikasi politik tidak boleh digunakan untuk mendeskreditkan pihak lain (lawan politik), atau sengaja dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain baik secara individu maupun kelompok (organisasi). Untuk menjaga “marwah” komunikasi politik sebagai alat untuk mencapai cita-cita bersama, maka perlu nalar Pancasila untuk membentenginya. Nalar Pancasila yang dimaksud adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Ke depan kiranya perlu digagas, bahwa pengembangan kurikulum bukan saja berbasis kompetensi, namun berbasis Pancasila.

Daftar Pustaka

- Adib, Mohammad, (2010). *Filsafat Ilmu. Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anugrah, Dadan, (2013). *Politik Pencitraan Wakil Rakyat (Studi Dramaturgis Tentang Komunikasi Politik Wakil Rakyat Di DPRD Kabupaten Bandung Jawa Barat)*. Disertasi di

Universitas Padjadjaran.
Bandung: Unpad.

- Ardial, (2009). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Badudu-Zain, (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan, (ed), (2006). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cangara, Hafied, (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan, (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Nimmo, Dan, (1999). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Rosda.
- Rahmat, Jalaluddin, (1996). *Islam Aktual*. Bandung: Mizan
- Sobur, Alex, (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida, (2014). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Syahputra, Iswandi, (2007). *Komunikasi Profetik, Konsep dan Pendekatan*. Bandung: Simbiosis.
- Syarbaini, Syahril, (2011). *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia